

DAFTAR PUSTAKA

- Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Program Studi Keuangan Daerah.*
(n.d.). 1–14.
- Arens, A. A., Elder, R. J., dan Beasley, M.S. 2011. *Auditing dan Jasa Assurance, Pendekatan Terintegrasi.* Jakarta: Erlangga.
- Bangsawan, A. A., & Abbas, A. (2021). *Efek Pelanggaran Standar Akuntansi Pemerintahan dan Ketidakpatuhan Peraturan terhadap Opini Audit Laporan Keuangan di Sulawesi Selatan.* 21(2), 461–472.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik.* Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.* Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik).* Edisi Pertama. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Dharmaningtyas, D. (2016). *PENGARUH KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung).* 147(March), 11–40
- Erwinton Putra Antonius Tarigan; Lastria Nurtanzila. (2013). *Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.* *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik),* 17(1), 29–45.
- Fatimah, Desi. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan PerundangUndangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia.* *Jurnal Akuntansi,* Vol. 3, No. 1, Oktober 2014 : 1 – 15. Pekanbaru: Universitas Riau

- Fallis, A. . (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Fitriana, N., Anugerah, R., & Fitrioso, R. (2020). *PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DANA INSENTIF DAERAH TERHADAP OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI AUDIT SEBAGAI VARIABEL INTERVENING*. 8(2), 123–135.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm SPSS 24 (Edisi Keenam)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hall, James A and Singleton Tommie. 2007. *Information Technology Auditing and Assurance*. Terjemahan Dewi Fitriasari dan Deny Arnos Kwary. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Hidayah, K., Wismono, F. H., Kusumaningrum, M., & Amarullah, R. (2019). The Role of Regional Inspectorate of Samarinda City In Maintaining Unqualified Opinion. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2), 221–236. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.538>
- Karianga, Hendra. 2017. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*.Kencana: Depok.

- Kompas, Nasional. 2017. Jokowi: Opini WTP Bukan Prestasi, Tapi Kewajiban. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/11250701/jokowi-opini-wtp-bukan-prestasi-tapi-kewajiban>. Diakses tanggal 17 Januari 2023. Singaraja.
- Nurabiah. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3 (1), 67-100.
- Nordiawan, Deddy. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nasution, D. A. D. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 30–43.
- Putra, L. A. G. (n.d.). *STRATEGI MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECCUALIAN (WTP) AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT*. 1–9. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Putri, R.I.I, Jeri Araiku, Novita Sari. 2020. *Statistik Deskriptif*. Palembang: Bening.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. 22 Oktober 2010. Jakarta.

- Rufaedah, Y. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Kabupaten Bandung Barat. *Sigma-Mu*, 12(2), 44–64.
- Setiawan, R. A. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan terhadap Opini LKPD Sulawesi Selatan*. 1–20.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

